



BALAI PELAYANAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



022 - 7336965



jabar.bp2mi.go.id



@bp2mi_jabar



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pedoman penyusunan Laporan Kinerja yang baru berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode Laporan Kinerja yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Pembandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 26 Januari 2026
Kepala,



Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P.
Kombes Pol. NRP. 80091267



DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi BP3MI	2
B. Sumber Daya Manusia	4
C. Potensi Permasalahan	9
D. Sistematika Pelaporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis BP3MI Jawa Barat	11
B. Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Triwulan	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	38
A. Permasalahan	38
B. Saran Tindak Lanjut	40



DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1 ASN BP3MI Jawa Barat Tahun 2025	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025	12
Tabel 2.2 Reviu Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025	13
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I – Triwulan III	15
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan (Reviu PK Tahun 2025)	16
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Realisasi Triwulanan	17
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama 1	18
Tabel 3.5 Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman	20
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2	22
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama 3	24
Tabel 3.8 Rekap Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan	25
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama 4	26
Tabel 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi & Reintegrasi PMI Bermasalah	27
Tabel 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna	28
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama 5	29
Tabel 3.13 Predikat Penilaian AKIP	30
Tabel 3.14 Nilai Komponen Manajemen Kinerja	31
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama 6	32
Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Utama 7	34
Tabel 3.17 Nilai Kinerja Anggaran BP3MI Jawa Barat Tahun 2025	35
Tabel 3.18 Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2025	36



DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1 Struktur Organisasi BP3MI Jawa Barat	4
Gambar 2 Jumlah Pegawai menurut Status Kepegawaian	5
Gambar 3 Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja	7
Gambar 4 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	7
Gambar 5 Jumlah Pegawai menurut Golongan	8
Gambar 6 Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	8

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025. BP3MI Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan total 7 (tujuh) Indikator Kinerja, dan 7 (tujuh) Target Kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	9.275 orang	6400 orang	69,00
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%	80%	133,33
Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	192 orang	152 orang	79,17



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70	78,30	111,86
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	60	66	110
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75	81,86	109,15

Kinerja keuangan BP3MI Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 9.639.525.289,- atau 93,57% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 10.302.341.000,-.

Capaian kinerja BP3MI Jawa Barat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



BAB I – PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Latar belakang Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban transparan atas pencapaian visi, misi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan. Dokumen ini menyoroti evaluasi strategis terhadap tantangan pembangunan, seperti kebutuhan IPTEK, pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan penduduk, untuk memastikan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

BP3MI Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitasnya dengan menjaga nilai evaluasi Reformasi Birokrasi, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan menjaga tingkat kepuasan pengguna layanan. Hal tersebut membuat BP3MI terus meningkatkan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan *stakeholders* terkait di tahun 2025.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan capaian kinerja program BP3MI perlu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Good Governance*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unti organisasi di lingkungan BP3MI agar lebih efisien dan efektif.



A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP3MI

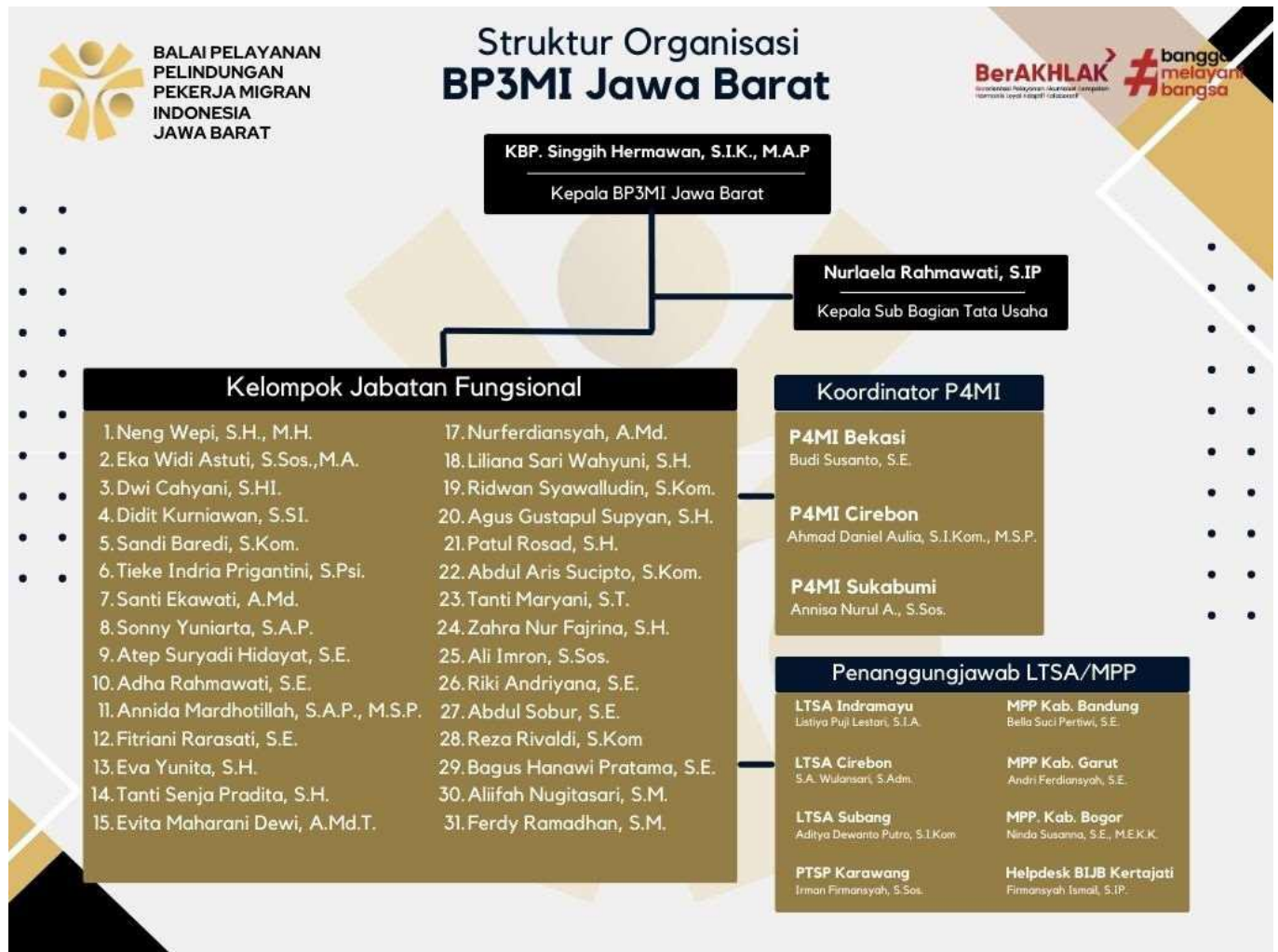
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BP3MI Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
4. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
6. Pelaksanaan fasilitasi Orientasi Pra Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
7. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia;
8. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
9. Pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan;
11. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;



12. Pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputan teknis terkait;
13. Pencegahan dan penanganan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprosedural;
14. Pelaksanaan pemulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia;
15. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
16. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
17. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BP3MI Jawa Barat memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi BP3MI Jawa Barat

B. SUMBER DAYA MANUSIA

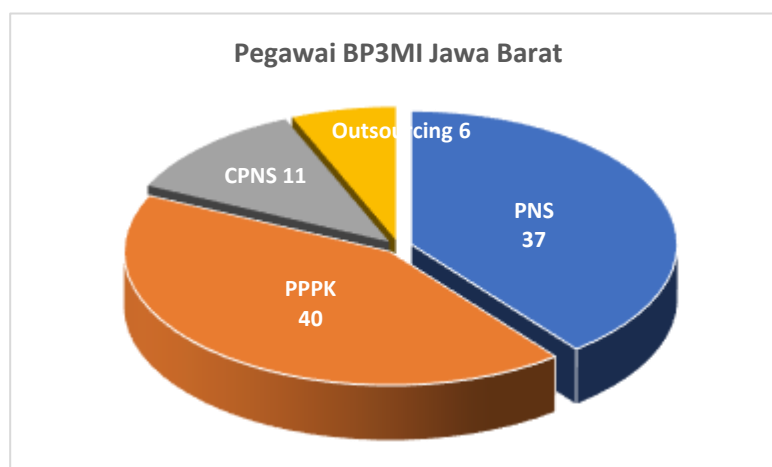
BP3MI Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 88 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 37 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 40 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 11 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti terinci pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1
ASN BP3MI Jawa Barat Tahun 2025

No	Unit Kerja	STRUKTURAL			FUNGSIONAL			PELAKSANA			PPPK			CPNS			JUMLAH
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	BP3MI Jawa Barat	1	1	2	6	7	13	3	2	5	17	6	23	0	4	4	47
2	P4MI Bekasi	-	-	0	-	2	2	-	-	0	4	-	4	1	1	2	8
3	P4MI/LTSA Cirebon	-	-	0	1	1	2	1	3	4	4	-	4	-	-	0	10
4	P4MI/LTSA Sukabumi	-	-	0	-	1	1	-	-	0	4	-	4	1	1	2	7
5	LTSA Indramayu	-	-	0	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	4
6	LTSA Karawang	-	-	0	-	1	1	-	-	0	1	-	2	-	1	1	4
7	LTSA Subang	-	-	0	-	-	0	2	-	2	1	-	1	-	1	1	4
8	MPP. Kab. Bandung	-	-	0	-	-	0	-	1	1	-	-	0	-	-	0	1
9	MPP Kab. Garut	-	-	0	-	-	0	-	-	0	1	-	1	-	-	0	1
10	MPP Kab. Bogor	-	-	0	-	2	2	-	-	0	-	-	0	-	-	0	2
Jumlah		1	1	2	8	14	22	6	7	13	33	6	40	2	9	11	88

Jumlah pegawai BP3MI Jawa Barat sampai bulan Desember 2025 mencapai 88 (delapan puluh delapan) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 40 (empat puluh) orang, 11 (sebelas) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 6 (enam) orang Pegawai *Outsourcing*.



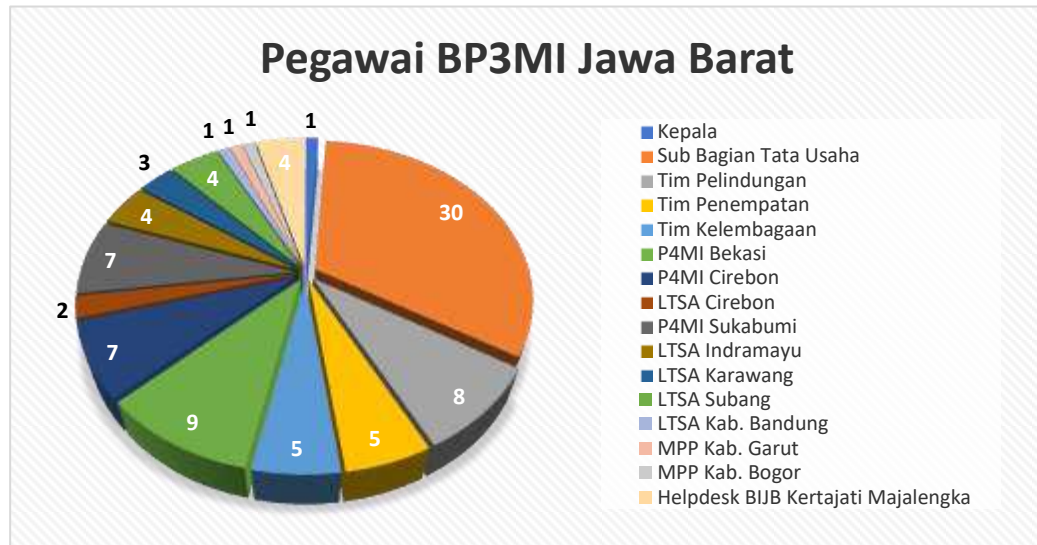
Gambar 2
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian



Adapun rincian PNS, PPPK, CPNS dan *Outsourcing* Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

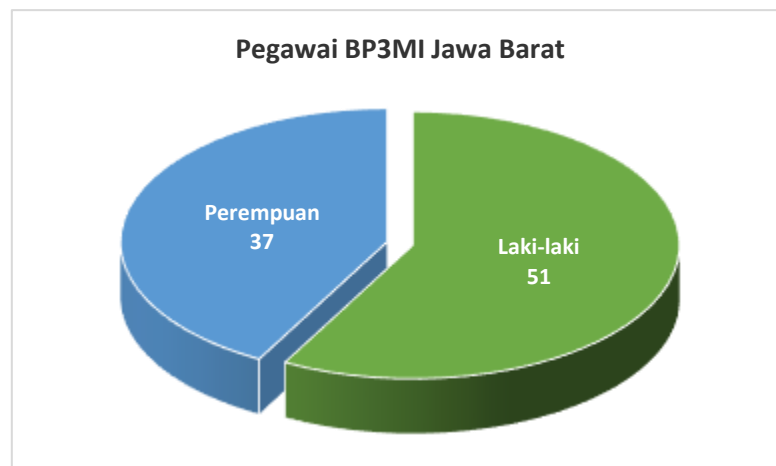
a. Jumlah pegawai menurut unit kerja :

- 1) Kepala BP3MI Jawa Barat sebanyak 1 orang PNS;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 30 orang (11 orang PNS, 3 orang CPNS, 15 orang PPPK, dan 1 orang *Outsourcing*);
- 3) Tim Pelindungan BP3MI Jawa Barat sebanyak 8 orang (4 orang PNS, 3 orang PPPK, dan 1 orang *Outsourcing*);
- 4) Tim Penempatan BP3MI Jawa Barat sebanyak 5 orang (3 orang PNS dan 2 orang PPPK);
- 5) Tim Kelembagaan BP3MI Jawa Barat sebanyak 5 orang (3 orang PNS, 1 orang CPNS, dan 1 orang PPPK);
- 6) P4MI Bekasi sebanyak 9 orang (2 orang PNS, 2 orang CPNS, dan 5 orang PPPK);
- 7) P4MI Cirebon sebanyak 7 orang (3 orang PNS, dan 4 orang PPPK);
- 8) LTSA Cirebon sebanyak 2 orang PNS;
- 9) P4MI/LTSA Sukabumi sebanyak 7 orang (1 orang PNS, 2 orang CPNS, 4 orang PPPK);
- 10) LTSA Indramayu sebanyak 4 orang (1 orang PNS, 1 orang CPNS, dan 2 orang PPPK);
- 11) LTSA Karawang sebanyak 3 orang (1 orang CPNS dan 2 orang PPPK);
- 12) LTSA Subang sebanyak 4 orang (2 orang PNS, 1 orang CPNS dan 1 orang PPPK);
- 13) LTSA Kab. Bandung sebanyak 1 orang PNS;
- 14) MPP Kab. Garut sebanyak 1 orang PPPK;
- 15) MPP Kab. Bogor sebanyak 1 orang PNS;
- 16) Helpdesk BIJB Kertajati Majalengka sebanyak 4 orang *Outsourcing*.



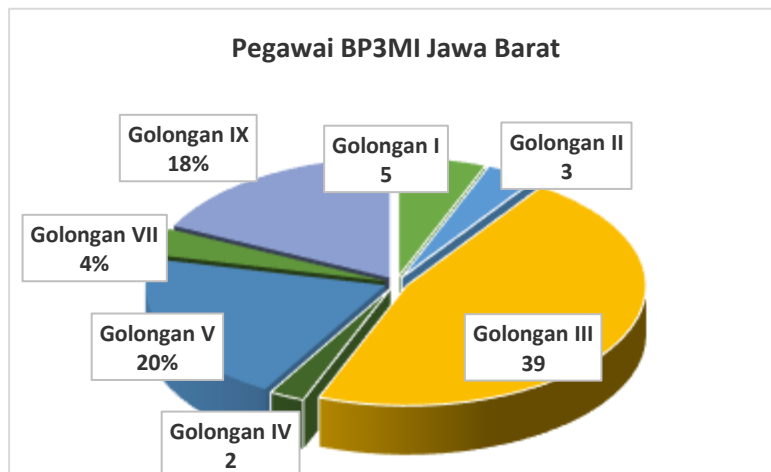
Gambar 3
Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

- b. Rincian pegawai ASN (PNS, PPPK dan CPNS) BP3MI Jawa Barat berdasarkan Jenis Kelamin adalah 51 orang laki-laki dan 37 orang perempuan.



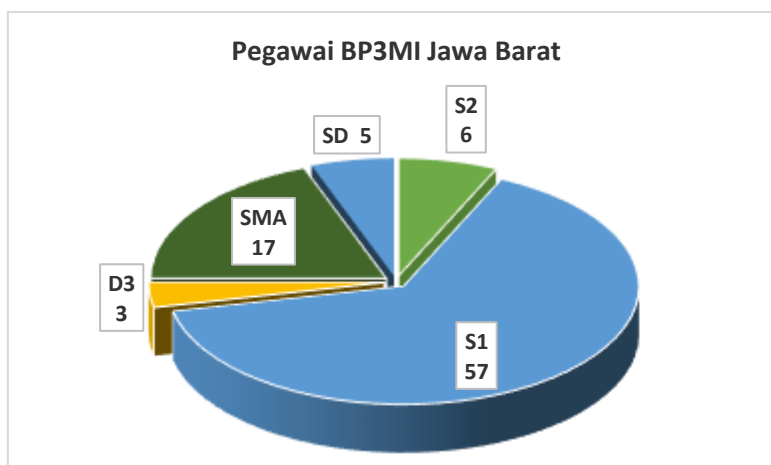
Gambar 4
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

- c. Rincian pegawai ASN (PNS, PPPK dan CPNS) BP3MI Jawa Barat berdasarkan Golongan adalah Golongan IX sebanyak 12 orang, Golongan VII sebanyak 3 orang, Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 34 orang, Golongan II sebanyak 2 orang, dan Golongan I sebanyak 0 orang.



Gambar 5
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

- d. Rincian pegawai ASN (PNS, PPPK dan CPNS) BP3MI Jawa Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 38 orang, D3 sebanyak 5 orang, dan SMA sebanyak 1 orang.



Gambar 6
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



C. POTENSI PERMASALAHAN

Terdapat beberapa potensi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. Hasil Pemetaan Potensi CPMI yang dilakukan oleh BP3MI Jawa Barat masih merupakan data mentah dan belum spesifik mengarah pada Peta CPMI.
2. Belum adanya potret daerah yang dapat digunakan dalam pembuatan model penyuluhan/sosialisasi.
3. Perlunya Bimbingan Teknis Petugas Penyuluh dalam rangka Peningkatan SDM.
4. Pemanfaatan Jobs Info masih belum sempurna, karena Petugas Jobs Info tidak dapat mengetahui berapa orang Jawa Barat yang telah mengakses ke Jobs Info.
5. Koneksi Jaringan (internet) yang tidak stabil mempengaruhi akses ke SISKOP2MI.
6. Realisasi Penempatan berbeda dengan realisasi PAP, karena PMI Cuti dan Re-Entry tidak mengikuti PAP sedangkan itu menjadi angka realisasi penempatan.
7. Permasalahan kasus terhadap PMI yang habis kontrak namun masih dipertahankan oleh majikan sedangkan keluarga dan PMI tersebut ingin pulang. BP3MI Jawa Barat sudah ber kirim surat ke Kementerian Luar Negeri namun surat tersebut tidak ditanggapi.
8. Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan tidak ada anggaran monitoring walaupun lewat telepon tetapi tidak maksimal.
9. Tidak adanya anggaran untuk Identifikasi peserta Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan sehingga peserta yang diinginkan sesuai PERKA Badan tidak bisa dipenuhi.
10. Perlunya Bimbingan Teknis Evaluator Akuntabilitas Kinerja.



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3MI Jawa Barat Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi BP3MI dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja BP3MI.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran BP3MI.

Bab IV – Penutup, pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh BP3MI untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BP3MI JAWA BARAT

Rencana Strategis (Renstra) BP3MI Jawa Barat 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3MI Jawa Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BP3MI Jawa Barat mengacu pada Renstra KP2MI/BP2MI tahun 2025-2029, namun saat ini belum tersusun karena masih dalam masa transisi. Secara ringkas substansi BP3MI dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BP3MI Jawa Barat selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan dan mendukung Visi tersebut, BP3MI Jawa Barat menetapkan 4 (empat) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Menyenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- d) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI.



3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BP3MI menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2025, yaitu:

- a) Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa;
- b) Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

B. PERJANJIAN KINERJA BP3MI JAWA BARAT

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025, BP3MI Jawa Barat telah menetapkan Sasaran Strategis dan IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sementara yang sebelumnya sudah ditandatangani pada bulan Februari 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama	75%
Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan kepulangan bagi PMI yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	40 Orang
	Jumlah purna pekerja migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	40 Orang
	Jumlah fasilitasi pelayanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit, dan meninggal	112 Orang



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatkan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	27.868 Orang
Meningkatkan pengawasan jaminan sosial	Fasilitasi Klaim jaminan sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI	100%
Meningkatkan kapasitas supply	Data supply	2.000 Orang
	Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	5.000 Orang
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	100%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik

Kegiatan

1. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP3MI

Anggaran

Rp. 6.318.828.000,-
Rp. 5.321.483.000,-

Sehubungan terdapat Percermatan Anggaran yang mempengaruhi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, maka terdapat Reviu Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati bulan Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Reviu Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	9.275 orang
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%
Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	192 orang



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	60
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75

Kegiatan

1. Pelayanan Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
2. Dukungan Manajemen Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Anggaran

Rp. 6.158.356.000,-

Rp. 3.562.868.000,-



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode sederhana yang membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran kinerja dimaksud.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menyajikan pengukuran capaian kinerja BP3MI Jawa Barat selama Triwulan I sampai Triwulan IV dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya. Secara rinci hasil pengukuran capaian kinerja triwulanan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I – Triwulan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	17,5%	25,33%	17,5%	13,33%	17,5%	27,5%
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	75,75%	100%	80,76%	100%	69,76%
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Implementasi Kerjasama	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang
	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
keputusan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan	mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial						
	Jumlah fasilitas pelayanan keputusan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	0 Orang	0 Orang	40 Orang	21 Orang	40 Orang	38 Orang
Meningkatkan Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	6.967 Orang	7.110 Orang	6.967 Orang	7.410 Orang	6.967 Orang	8.522 Orang
Meningkatkan Pengawasan Jaminan Sosial	Fasilitas Klaim jaminan sosial oleh CPMI dan Pekerja Migran Indonesia yang dilayani oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kapasitas Supply	Data supply	500 Orang	75 Orang	500 Orang	544 Orang	500 Orang	432 Orang
	Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	1.250 Orang	252 Orang	1.250 Orang	6.342 Orang	1.250 Orang	0 Orang
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75	91,5	75	91,5	75	91,5
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Untuk Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV menggunakan Indikator Kinerja Utama yang Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan
(Reviu PK Tahun 2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	400 orang	200 orang	600 orang	400 orang	3.000 orang	1.000 orang	5.275 orang	4.800 orang



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%	84%	60%	73%	60%	80%	60%	82%
Meningkatnya Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	0 orang	0 orang	40 orang	21 orang	40 orang	38 orang	112 orang	93 orang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70	78,30	70	78,30	70	78,30	70	78,30
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	75	91,5	75	91,5	75	91,5	60	66
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	75	81,86

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 diukur dari seluruh pencapaian IKU. Capaian kinerja pada Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 94,17% yang dihitung dari rata-rata capaian 7 (tujuh) IKU. Berikut ringkasan capaian kinerja BP3MI Jawa Barat tahun 2025:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Realisasi Triwulanan

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi				Capaian s.d. TW IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	9.275 orang	200 orang	400 orang	1.000 orang	4.800 orang	69,00
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%	84%	73%	80%	82%	80



Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi				Capaian s.d. TW IV (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100
Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	192 orang	0 orang	21 orang	38 orang	93 orang	79,17
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70	78,30	78,30	78,30	78,30	111,86
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	60	91,5	91,5	91,5	66	110
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75	Baik	Baik	Baik	81,86	109,15

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“TERSEDIAANYA DATA PERSEDIAAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA”

IKU 1 – Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	9.275 orang	6.400 orang	69,00%

a. Informasi Kinerja

Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI dihasilkan dari kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yang berfokus pada edukasi prosedur resmi, peningkatan perlindungan



dan pencegahan penempatan ilegal untuk mengurangi kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Kegiatan ini menysasar peningkatan wawasan Calon Pekerja, memaksimalkan remitansi, dan memfasilitasi penempatan secara aman dan bermartabat. Terdapat informasi kinerja pada kegiatan Sosialisasi, diantaranya:

- Target Utama : Meningkatkan wawasan mengenai mekanisme bekerja ke Luar Negeri secara aman dan legal guna menghindari penipuan atau masalah hukum;
- Capaian Pelindungan : Pada tahun 2024, dilaporkan penurunan signifikan kasus Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
- Tujuan Sosialisasi : Memberdayakan Masyarakat melalui informasi lowongan kerja, terutama sektor formal/kelautan, serta memfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan PMI Purna;
- Dampak Ekonomi : Pekerja Migran melalui jalur aman ini berkontribusi signifikan pada ekonomi melalui Remitansi dengan rata-rata gaji antara Rp. 5 juta hingga Rp. 23 juta per bulan (2021-2023);
- Kolaborasi : Kegiatan ini dilaksanakan Bersama KP2MI/BP2MI (BP3MI) dan DPR-RI untuk memberikan pemahaman menyeluruh.

b. Evaluasi Kinerja

Kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman tahun 2025 menunjukkan fokus kuat pada peningkatan penempatan prosedural melalui penguatan pelindungan. Capaian kinerja menargetkan penurunan PMI nonprosedural dengan realisasi cukup signifikan, namun memerlukan pengawasan berkelanjutan dari pra hingga purna penempatan.

Dalam rangka meningkatkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional, BP3MI Jawa Barat melakukan upaya penyebaran informasi terkait penempatan prosedural melalui kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yang berkolaborasi dengan DPR-RI dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan sosialisasi yang menargetkan peserta sosialisasi dari kalangan masyarakat umum dan para pelajar.

Pada tahun 2025, BP3MI Jawa Barat menargetkan sebanyak 9.275 orang peserta kegiatan Sosialisasi yang terdiri dari 8.100 orang (15 Paket) kegiatan Sosialisasi Peluang kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman, 550 orang (1 Paket)



kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI Non Prosedural dan Migrasi Aman, dan 625 orang (5 Paket) kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri. Namun pada pertengahan tahun terdapat revisi dan penghematan anggaran, sehingga kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan hanya Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yang semula sebanyak 8.100 orang (15 Paket) direvisi menjadi 6.400 orang (32 Paket). Sedangkan realisasi kegiatan Sosialisasi pada Tahun 2025 sebanyak 6.400 orang (32 Paket) atau sebesar 69,00% dari target awal 9.275 orang.

Adapun penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman

No	Waktu	Lokasi	Jumlah Peserta
1	24 Maret 2025	Aula Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur	200 orang
2	25 April 2025	Kantor PCNU Kota Jl. Cipanas 2 No. 1 Gedong Panjang, Citamiang, Kota Sukabumi	200 orang
3	25 April 2025	Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Bojong, Kab. Sukabumi	200 orang
4	6 Agustus 2025	Gedung Serbaguna Kel. Harapan Jaya, Bekasi Utara Kota Bekasi	200 orang
5	14 September 2025	Hotel Augusta Lembang, Kab. Bandung Barat	200 orang
6	17 September 2025	GOR Kantor Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang	200 orang
7	20 September 2025	Gor Desa Banyuasih Kec. Banyusari Kab. Karawang	200 orang
8	27 September 2025	Lapangan Futsal TB Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin, Kab. Bekasi	200 orang
9	11 Oktober 2025	Balai Patriot, Kota Bekasi	200 orang
10	25 Oktober 2025	Perum D'Griya Kosambi, Kab. Karawang	200 orang
11	29 Oktober 2025	The Castle Resto & Wedding Hall, Kota Depok	200 orang
12	02 November 2025	Jl. Raya Pelabuhan Ratu KM 30 Pasar Baru Cigombong, Warung Kiara, Kab. Sukabumi	200 orang
13	03 November 2025	Hotel Augusta Pelabuhan Ratu Citepus, Kec. Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi	200 orang
14	03 November 2025	Graha Harmas Brataseni (SMK Wisata Harapan Massa Depok) Kota Depok	200 orang
15	03 November 2025	Lapangan Futsal Dwi Putra Kp. Palasari Desa Kutalanggeng, Tegalwaru Kab. Karawang	400 orang
16	13 November 2025	Gor Gumilang, Jl. Tipar Sari No. 581, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok	200 orang



No	Waktu	Lokasi	Jumlah Peserta
17	13 November 2025	Bento Kopi Pakansari Kab. Bogor	200 orang
18	14 November 2025	Aula Rabbani, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung	200 orang
19	15 November 2025	Hotel Lembah Hijau Cipanas, Jln. Raya Cipanas No. 32, Gadog, Kec. Pacet, Kab. Cianjur	200 orang
20	17 November 2025	Desa Rawasari Kec. Plered Kab. Purwakarta	400 orang
21	18 November 2025	Asrama Haji, Kota Bekasi	200 orang
22	20 November 2025	GOR Bulutangkis Kp. Cilandak Desa Cirangkong, Cibatuk Kab. Purwakarta	400 orang
23	21 November 2025	Asrama Haji, Kota Bekasi	200 orang
24	24 November 2025	Wisma Graha Transportasi, Kab. Bogor	400 orang
25	13 Desember 2025	Aula Desa Dayeuh Luhur, Kec. Tempuran, Kab. Karawang	200 orang
26	13 Desember 2025	Dusun Pulo Haur, Desa Pulo Mulyo, Kab. Karawang	200 orang
27	14 Desember 2025	SD IT Madany, Parung Panjang, Kabupaten Bogor	200 orang
28	21 Desember 2025	Aula Desa Cileunyi Wetan, Kab. Bandung	200 orang
Total Peserta			6.400 orang

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

Kegiatan sosialisasi sebanyak 32 Paket yang seharusnya bisa dilaksanakan secara teratur dalam setiap bulannya, baru bisa dilaksanakan mulai Triwulan III sesuai arahan Pusat, sehingga kegiatan padat menjelang akhir tahun. Selain itu, terdapat hambatan dari segi waktu yang harus menyesuaikan dengan jadwal dari pihak DPR-RI.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Salah satu strategi dalam penyelesaian masalah terkait dari segi waktu yaitu mendorong Tim Tenaga Ahli dari DPR-RI untuk menjadwalkan kegiatan dengan memberikan informasi target akhir dapat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, serta dengan menyebarkan sumber daya manusia untuk dapat membantu pelaksanaan kegiatan.



SASARAN STRATEGIS 2

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN NONPEMERINTAH”

IKU 2 – Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%	80%	133,33%

a. Informasi Kinerja

BP3MI Jawa Barat terus mendorong dan mengupayakan peningkatan kualitas penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional dengan melayani proses penyiapan penempatan pekerja migran Indonesia baik melalui skema G to G, G to P, P to P, maupun perseorangan. Dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia, BP3MI Jawa Barat melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dalam upaya meningkatkan pemahaman calon pekerja migran Indonesia terhadap negara penempatan, peraturan ketenagakerjaan di negara penempatan, adat istiadat maupun budaya negara penempatan, serta materi lain yang menunjang pemahaman calon pekerja migran Indonesia dalam mempersiapkan pemberangkatan ke negara penempatan. Selain itu, calon pekerja migran Indonesia juga dibekali pemahaman terkait kesehatan jasmani dan mental dalam mengatasi permasalahan di negara penempatan melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan.

b. Evaluasi Kinerja

Tahun 2025 terdapat peralihan sistem dari SIAPKerja ke SISKOP2MI. Dalam adaptasi penyesuaian tersebut, masih terdapat kendala terutama untuk skema P to P untuk pengajuan ID sampai pengajuan orientasi pra pemberangkatan. BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan K/L terkait dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, dalam menunjang pemahaman calon pekerja migran Indonesia dalam materi orientasi pra



pemberangkatan, BP3MI Jawa Barat melaksanakan Pre Test dan Post Test terhadap calon pekerja migran Indonesia melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan dengan hasil rata-rata di atas 60%.

Calon pekerja migran Indonesia diberikan pemahaman dalam materi perjanjian kerja, peraturan ketenagakerjaan, adat istiadat atau budaya negara penempatan serta materi penunjang lainnya yang mendorong pemahaman pekerja migran Indonesia dalam bekerja sesuai jabatannya. Materi kesehatan jasmani dan mental serta literasi keuangan yang dapat mendorong pekerja migran Indonesia mengelola keuangan atau pendapatannya selama di negara penempatan. Hal tersebut bertujuan agar pekerja migran Indonesia mandiri secara finansial dan berdaya sesuai minat dan kemampuannya.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

Peralihan sistem dalam proses penempatan calon pekerja migran Indonesia membuat K/L terkait melakukan penyesuaian sehingga terdapat kendala maupun hambatan yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala tersebut, BP3MI Jawa barat terus berusaha meningkatkan pemahaman calon pekerja migran Indonesia dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman di wilayah Jawa Barat serta mendorong kerja sama dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan serta meningkatkan penempatan PMI terampil dan profesional, BP3MI Jawa Barat terus meningkatkan kualitas instruktur orientasi pra pemberangkatan dengan mengikuti pelatihan dan menyebarkan pre test post test ke calon pekerja migran Indonesia serta menajamkan materi dan pemahaman perjanjian kerja, peraturan ketenagakerjaan serta materi lainnya yang menunjang calon pekerja migran Indonesia dalam persiapan pemberangkatan ke negara penempatan.



SASARAN STRATEGIS 3

“MENINGKATNYA FASILITASI PENANGANAN PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”

IKU 3 – Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%

a. Informasi Kinerja

Layanan Penanganan Permasalahan disini yang dimaksud adalah layanan pengaduan kasus yang diterima langsung oleh BP3MI Jawa Barat. Menurunnya permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia terjadi dikarenakan BP3MI Jawa Barat selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia dengan memanggil para pihak terkait untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak PMI. Penanganan permasalahan dilaksanakan dengan cara diantaranya:

- 1) Penerimaan dan pengidentifikasian pengaduan;
- 2) Pencatatan pengaduan dan penganalisisan pengaduan;
- 3) Konsultasi;
- 4) Klarifikasi; dan
- 5) Mediasi (dalam hal tidak dapat selesai di tahap klarifikasi).

b. Evaluasi Kinerja

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Tim Pelayanan Aduan Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pengguna Jasa Perseorangan dan Berbadan Hukum di lingkungan BP3MI Jawa Barat untuk periode Tahun 2025 berjumlah 532 kasus. Terdiri dari 398 kasus berupa surat masuk dan 134 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka & Helpdesk). Sebanyak 532 kasus (100%) aduan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui proses pendalaman kronologi, klarifikasi, mediasi, persuratan ke direktorat teknis Kementerian



P2MI, monitoring tindak lanjut surat dari KP2MI kepada Perwakilan RI di negara penempatan, sampai dengan penutupan kasusnya. Pada saat ini BP3MI Jawa Barat telah memiliki layanan aduan online melalui kontak Helpdesk Crisis Center BP3MI Jawa Barat yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya. Pada tahun 2025, target fisik penanganan aduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI Jawa Barat ialah sebanyak 600 aduan, dengan target per triwulan sebanyak 150 aduan.

Tabel 3.8
Rekap Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan

No	Status Penanganan Aduan	Tahun 2025
1	Dalam Proses	151
2	Pelimpahan Internal	31
3	Pelimpahan Eksternal, Selesai	132
4	Selesai	218

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

Trend permasalahan yang sering ditemukan ialah terkait Pekerja Migran Indonesia yang baru diberangkatkan beberapa hari ke negara penempatan secara nonprosedural khususnya wilayah Asia dan Timur Tengah, namun setelah mengetahui bahwa prosesnya ilegal, Pekerja Migran Indonesia menyampaikan permohonan bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Akan menjadi kendala apabila di negara penempatan dirinya telah menandatangani dokumen perjanjian kerja dan terikat hukum yang berlaku di negara penempatan (masuk secara ilegal, tidak memiliki identitas dan izin kerja, menjadi tanggungjawab kafil/pengguna jasanya).

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Memberikan pendampingan bagi keluarga untuk melaporkan pihak-pihak yang secara tidak bertanggungjawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia kepada Kepolisian setempat sebagai upaya penegakkan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



SASARAN STRATEGIS 4

“MENINGKATNYA FASILITASI LAYANAN PEMBERDAYAAN OLEH BP3MI”

IKU 4 – Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial, dan Ekonomi oleh BP3MI

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial, dan Ekonomi oleh BP3MI	192 Orang	152 Orang	79,17%

a. Informasi Kinerja

Dalam hal ini yang dimaksud dengan layanan kepulangan PMI adalah kegiatan fasilitasi pemulangan CPMI/PMI/Keluarganya yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja di luar negeri. Selain itu, Jumlah individu Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang menerima layanan rehabilitasi dan reintegrasi setelah mereka kembali dari bekerja di luar negeri. Fasilitasi rehabilitasi dalam hal ini antara lain perawatan lanjutan yang dilakukan di dalam negeri bagi PMI yang sakit, baik pemulihan fisik maupun pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat. Fasilitasi rehabilitasi dalam hal ini antara lain perawatan lanjutan yang dilakukan di dalam negeri bagi PMI yang sakit, baik pemulihan fisik maupun pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat.

Fasilitasi pemberdayaan bagi purna PMI merupakan pemberian pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terintegrasi setelah penempatan (edukasi keuangan, kewirausahaan, edukasi akses ke lembaga keuangan, *parenting*).



b. Evaluasi Kinerja

Jumlah target Fasilitas Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah sebanyak 112 orang. Pada periode Tahun 2025, BP3MI Jawa Barat telah memfasilitasi pembiayaan transport kepulangan PMI terkendala sebanyak 2 orang, penyerahan bantuan PMI sakit sebanyak 31 orang, dan meninggal dunia sebanyak 39 orang. Sehingga total fasilitasi layanan kepulangan pada tahun 2025 sebanyak 72 orang.

Jumlah target peserta kegiatan Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah 40 orang. Pada periode Tahun 2025, terdapat sebanyak 20 Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan 20 Purna Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi Reintegrasi yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat, berikut rincian kegiatannya :

Tabel 3.10
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi & Reintegrasi PMI Bermasalah

NO	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PMI	NEGARA PENEMPATAN	DAERAH ASAL PMI	MITRA PELATIHAN
1	27 - 29 Agustus 2025	Gardena Hotel Indramayu	20	- Timur Tengah - Suriah - Singapura - Bosnia - Malaysia - Hongkong - UEA - Taiwan - Arab Saudi	Kab. Indramayu	- Pemkab Indramayu - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - BPJS Kesehatan Indramayu - Klinik Utama Medissina
2	22 – 23 September 2025	Hotel Gino Ferucci Cianjur	20	- Turki - Korea Selatan - Polandia	Kab. Ciajur	- Pemkab Cianjur - Disnakertrans Kab. Cianjur - Balai Latihan Kerja - Polres Cianjur

Jumlah target Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya yang tercantum dalam Renstra BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah 40 orang dengan jenis pemberdayaan ekonomi (20 peserta) dan sosial (20 peserta). Untuk tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan dengan adanya perubahan skema pelatihan kewirausahaan dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dibatasi. Pada tahun 2025, terdapat pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.11
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna

NO	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PMI	NEGARA PENEMPATAN	JENIS PELATIHAN	MITRA PELATIHAN
1	15 – 18 Juli 2025	Grand Cordela Hotel AS Putra, Kab. Kuningan	20	- Taiwan - Dubai - Abu Dhabi - Arab Saudi - Brunei Drslm - Irak - Qatar - Malaysia	Sektor Pariwisata Kuliner: Pembuatan Brownies dan Puff Pastry	Ibu Nindi Apridha Jamil Praktisi Kuliner Tata Boga
2	18 – 21 Nov 2025	Hotel Harper Purwakarta	20	- Brunei Darusalam - Turki - Malaysia - UEA - Arab Saudi	Tata Rias/Make Up Artist	Ibu Yevie Minahraharja selaku Praktisi Kecantikan/ Tata rias

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Tingginya angka kepulangan Pekerja Migran Indonesia deportasi, Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan keberangkatan nonprosedural asal Jawa Barat, namun dengan diberlakukannya Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran, layanan yang dapat difasilitasi ialah pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal, sementara bagi yang terkendala akan diupayakan pemulangan secara mandiri, dijemput pihak keluarga, maupun difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- Pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI dan kegiatan Pemberdayaan PMI Purna terjadi Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran;
- Belum diterbitkannya aturan turunan dari Perubahan Nomenklatur BP2MI menjadi Kementerian P2MI/BP2MI terutama aturan di pada kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan juga belum tersedianya Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan



rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan kegiatan Pemberdayaan PMI Purna.

i. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Pemulangan dan Rehabilitasi, serta pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemulangan PMI yang mengalami permasalahan;
- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Reintegrasi dan penguatan Keluarga petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan kegiatan Pemberdayaan PMI Purna;
- BP3MI Jawa Barat telah bersurat kepada beberapa daerah dengan permasalahan Pekerja Migran Indonesia terbanyak untuk dapat mengusulkan data calon peserta kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu, BP3MI Jawa Barat telah meninjau usulan peserta pelatihan yang diterima dari Disnaker Kabupaten Kuningan serta melakukan verifikasi data calon peserta dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang akan terlaksana pada periode tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS 5

“MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN DI LINGKUNGAN BP3MI”

IKU 5 – Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70	78,30	111,86%

**a. Informasi Kinerja**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal merupakan komponen krusial dalam SAKIP (sesuai Permenpan RB No 88/2021) untuk mengukur Tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen kinerja. Penilaian berfokus pada kualitas pelaksana, dan tindak lanjut perbaikan yang bertujuan menjamin pertanggungjawaban hasil. Informasi utama yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan Evaluasi (Aspek Administratif): adanya pedoman teknis, pelaksanaan di seluruh unit, dan dilakukan secara berjenjang;
- Kualitas Evaluasi (Aspek Kualitas): Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan pendalaman yang cukup, menggunakan teknologi informasi (aplikasi), dan didukung data riil;
- Pemanfaatan Evaluasi (Aspek Dampak): tindak lanjut hasil evaluasi, perbaikan manajemen kinerja, dan peningkatan akuntabilitas yang terlihat dari perbaikan hasil kinerja nyata.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran muali dari 0 sampai 100 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Predikat Penilaian AKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 – 90	Memuaskan
BB	> 70 – 80	Sangat Baik
B	> 60 – 70	Baik
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)
C	> 30 – 50	Kurang
D	> 0 – 30	Sangat Kurang

b. Evaluasi Kinerja

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja pada unit kerja, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pada unit kerja. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.



Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja KP2MI/BP2MI (internal) tahun 2024, BP3MI Jawa Barat memperoleh nilai **78,30** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Nilai Komponen Manajemen Kinerja

No	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	80,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	80,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	77,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	75,00	18,75
Total		100		78,30

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Belum terdapatnya dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yang berupa TOR/KAK sehingga perencanaan kinerja belum mendapatkan hasil yang maksimal;
- Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, namun SK/JUKNIS/Pedoman belum ada;
- Sampai dengan saat ini, informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, keberhasilan kinerja, perencanaan kinerja selanjutnya maupun budaya kinerja organisasi. Penyesuaian anggaran masih berdasarkan kebijakan dari Pimpinan dan Kementerian Keuangan;

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- Pada penilaian evaluasi kinerja selanjutnya akan dibuat dokumen perencanaan yang mendukung kinerja berupa TOR/KAK;
- Berkoodinasi dengan KP2MI/BP2MI terkait permintaan SK/JUKNIS/Pedoman yang mendukung evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Menunggu kebijakan pusat terkait acuan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, keberhasilan kinerja, perencanaan kinerja selanjutnya maupun budaya kinerja organisasi.



IKU 6 – Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3mi	60	66	110%

a. Informasi Kinerja

- 1) Hasil penyelenggaraan kearsipan berdasarkan nilai pengawasan kearsipan oleh unit kearsipan BP2MI terhadap BP3MI;
- 2) Pengawasan kearsipan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan;
- 3) Penilaian pengawasan kearsipan terdiri dari 2 aspek yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan;
- 4) Kategori penilaian yang ditetapkan oleh ANRI :
 - 0 - 30 : D (Sangat Kurang)
 - >30 - 50 : C (Kurang)
 - >50 - 60 : CC (Cukup)
 - >60 - 70 : B (Baik)
 - >70 - 80 : BB (Sangat Baik)
 - >80 - 90 : A (Memuaskan)
 - >90 - 100 : AA (Sangat Memuaskan)

b. Evaluasi Kinerja

Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2025, BP3MI Jawa Barat memperoleh nilai 66 berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal BP3MI Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan arsip di BP3MI Jawa Barat sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan Nilai 60. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2024 dengan nilai 91,5.

Adapun penurunan nilai pengawasan internal ini didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut:

- Terjadinya mutasi dan rotasi arsiparis ke unit layanan di daerah sebagai penyesuaian kebutuhan pegawai untuk mendukung pelaksanaan penugasan lain, sehingga berdampak pada keterbatasan pengelolaan kearsipan di unit kerja.



- Keterbatasan jumlah arsiparis atau petugas pengelola kearsipan dibandingkan dengan volume arsip yang harus dikelola.
 - Sumber daya kearsipan di BP3MI Jawa Barat telah rutin mengikuti bimbingan teknis kearsipan, namun belum mengikuti sertifikasi kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI, sementara sertifikasi tersebut merupakan salah satu unsur penilaian pengawasan kearsipan.
 - Keterbatasan jumlah arsiparis dibandingkan dengan jumlah arsip tercipta yang harus diperiksa sebelum penandatanganan, sehingga masih terdapat naskah dinas keluar yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan aplikasi sistem tata naskah dinas elektronik dalam proses penciptaan arsip.
 - Arsiparis/pengelola arsip yang tersedia belum dapat melaksanakan pengelolaan kearsipan secara optimal karena masih dibebani dengan beberapa penugasan lain di luar tugas dan fungsi kearsipan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja di BP3MI Jawa Barat.
- c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah
- i. Faktor Pendorong/Penghambat
- Terjadinya mutasi dan rotasi arsiparis ke unit layanan di daerah sebagai penyesuaian kebutuhan pegawai untuk mendukung pelaksanaan penugasan lain, sehingga berdampak pada keterbatasan pengelolaan kearsipan di unit kerja.
 - Keterbatasan jumlah arsiparis atau petugas pengelola kearsipan dibandingkan dengan volume arsip yang harus dikelola.
 - Sumber daya kearsipan di BP3MI Jawa Barat telah rutin mengikuti bimbingan teknis kearsipan, namun belum mengikuti sertifikasi kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI, sementara sertifikasi tersebut merupakan salah satu unsur penilaian pengawasan kearsipan.
 - Keterbatasan jumlah arsiparis dibandingkan dengan jumlah arsip tercipta yang harus diperiksa sebelum penandatanganan, sehingga masih terdapat naskah dinas keluar yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan



aplikasi sistem tata naskah dinas elektronik dalam proses penciptaan arsip.

- Arsiparis/pengelola arsip yang tersedia belum dapat melaksanakan pengelolaan kearsipan secara optimal karena masih dibebani dengan beberapa penugasan lain di luar tugas dan fungsi kearsipan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja di BP3MI Jawa Barat.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat telah mengusulkan penambahan arsiparis/pengelola arsip melalui mekanisme penempatan, mutasi internal, atau usulan formasi sesuai kebutuhan beban kerja kearsipan ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Arsiparis yang sebelumnya diberikan penugasan di luar tugas dan fungsi kearsipan akan dikembalikan sesuai dengan jabatan dan fungsinya, sehingga dapat lebih fokus dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan.
- Menetapkan petugas pengelola arsip di setiap unit kerja dan tim kerja untuk membantu arsiparis dalam pengelolaan arsip aktif.
- Menyempurnakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sistem tata naskah dinas elektronik dalam proses penciptaan arsip, serta mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang dikembangkan oleh ANRI.
- BP3MI Jawa Barat telah mengusulkan keikutsertaan arsiparis/pengelola arsip dalam pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pengisian formulir *Training Needs Analysis* (TNA).

IKU 7 – Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Utama 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75	81,86	109,15%



a. Informasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja sebagai pertanggungjawaban secara profesional kepada stakeholder atas penggunaan anggaran. EKA dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran tingkat satuan kerja pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai capaian kinerja anggaran merupakan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL yang terdapat pada SMART Kementerian Keuangan. Adapun nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja merupakan nilai kinerja atas aspek implementasi yang dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja yang meliputi:

- Penyerapan anggaran
- Konsistensi anggaran terhadap perencanaan
- Capaian rincian output
- Nilai efisiensi satuan kerja

b. Evaluasi Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja anggaran menggunakan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Kinerja Terpadu) Kemenkeu yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja anggaran. Berdasarkan aplikasi SMART, realisasi nilai capaian kinerja anggaran tahun 2025 yaitu sebesar 81,86 (Kategori Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Nilai Kinerja Anggaran BP3MI Jawa Barat Tahun 2025

Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Kinerja Anggaran
BP3MI Jawa Barat	69,53	94,19	81,86



c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Terdapat pagu minus yang disebabkan oleh realisasi anggaran untuk mencapai target rincian output melebihi alokasi anggaran yang ada;
- Capaian rincian output sangat rendah dan tidak mencapai target rincian output yang telah ditetapkan.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- Melakukan penajaman terhadap target prioritas nasional. Penajaman dilakukan dengan menghitung dengan cermat anggaran yang dibutuhkan untuk layanan penempatan, perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan *baseline* data yang dimiliki;
- Koordinasi dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Umum serta APIP terkait pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi penggunaannya, sehingga jika ditemukan kendala dapat segera diatasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian sasaran tahun 2025, BP3MI Jawa Barat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.302.341.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Program Dukungan Manajemen. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 9.639.525.289,- (93,57%). Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, maka dilakukan perbandingan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian kinerja pada setiap sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18
Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan IV	%	Rata-rata Capaian Tahun 2025 (%)
1	Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	2.400.000.000	2.167.355.907	90,31	9.275 orang	4.800 orang	51,75	69,00



No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan IV	%	Rata-rata Capaian Tahun 2025 (%)
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	2.145.836.000	1.858.682.013	86,62	60%			
3	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	33.695.000	27.434.740	81,42	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	3.808.542.000	3.469.046.001	91,09	192 orang	93 orang	48,44	79,17
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	4.314.268.000	4.284.362.535	99,31	70	78,30	111,86	111,86
		Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI				60	66	110	110
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI				75	81,86	109,15	109,15

Melihat capaian pada tabel di atas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya efisiensi pencapaian Sasaran Strategis secara optimal. Hal ini dapat dicapai melalui komitmen pimpinan terhadap pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target kinerja, program dan kegiatan serta penggunaan anggaran pada unit organisasi masing-masing.



BAB IV – PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 dapat dinyatakan “Berhasil”, karena realisasi 4 dari 7 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti memperbanyak kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, koordinasi dengan stake holder terkait mengenai penanganan pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia, sehingga terwujudnya instansi yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2020 Covid-19 terjadi di Indonesia sekitar dua tahun sehingga negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia banyak yang ditutup dan pada bulan Agustus tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Keputusan tersebut sebagai dasar penempatan



negara tujuan pekerja migran Indonesia dalam proses penempatan sehingga GTM terjadi penurunan yang drastis dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Tahun 2022 proses pelayanan penyiapan pekerja migran di Jawa Barat mulai meningkat khususnya calon pekerja migran terampil dan professional baik dari skema pemerintah, swasta, maupun mandiri.

Tahun 2023 terdapat peralihan sistem penempatan pekerja migran Indonesia dari SISKOTKLN ke SIAPKerja yang selanjutnya terintegrasi dengan SISKOP2MI. Adanya perubahan sistem tersebut membutuhkan penyesuaian khususnya pada skema penempatan P to P. Selain itu, di beberapa jabatan dalam SIP2MI telah habis masa berlakunya dan kurang tersedianya peminat calon pekerja migran Indonesia terhadap jabatan tersebut.

Permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pelindungan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran pihak P3MI pada saat jadwal klarifikasi & mediasi sehingga menghambat proses penyelesaian aduan;
- 2) Tidak tersedianya informasi progress penanganan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara penempatan bagi kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak eksternal, sebelum diterimanya surat brafax laporan penanganan aduannya;
- 3) Ketidaksediaan dan ketidaksiapan pengadu/keluarga pada proses pendampingan Laporan Polisi terhadap calo perseorangan mulai dari lengkapnya dokumen sebagai barang bukti, pengetahuan atas keseluruhan proses penyiapan penempatan, eksploitasi yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, ketersediaan saksi lain yang mendukung pernyataan pengadu, dsb;
- 4) Ketidaklengkapan dokumen aduan sehingga minimnya informasi yang dapat dicantumkan dalam surat penanganan aduan, serta pengadu tidak mengetahui pihak-pihak yang memproses penempatan illegal Pekerja Migran Indonesia (calo / pemproses baik yang dikenal langsung maupun lewat media sosial);
- 5) Belum adanya informasi atau aduan yang diterima terkait keberadaan penampungan / proses penempatan nonprosedural Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Barat;
- 6) Keinginan Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan untuk tetap berangkat secara nonprocedural setelah diamankan, diedukasi dan dipulangkan ke daerah asal;



- 7) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia terlaksana di luar wilayah Jawa Barat sehingga biaya fasilitasi pemulangan relatif lebih besar dari yang telah dianggarkan;
- 8) Informasi rencana kepulangan kerap baru diterima dihari yang sama dengan jadwal kepulangannya, sehingga tidak terdapat cukup waktu untuk mengkoordinasikan fasilitasi pendampingan dengan pemerintah daerah asal di wilayah Jawa Barat;
- 9) Tidak tersedianya dokumen identitas dan kontak keluarga dari Pekerja Migran Indonesia yang akan dituju setelah tiba di Indonesia.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

BP3MI Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman di wilayah Jawa Barat dengan tujuan pemahaman masyarakat Jawa barat terhadap proses penempatan yang procedural ke negara penempatan serta menghindari adanya calo-calo penempatan yang menjanjikan proses penempatan yang cepat namun ilegal. Selain itu, di setiap kantor BP2MI di wilayah Jawa Barat yaitu BP3MI Jawa Barat, P4MI, dan LTSA tersedia layanan jobsinfo untuk para pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun 2023 kementerian ketenagakerjaan mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2023 tentang pencabutan keputusan Menteri ketenagakerjaan nomor 294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sehingga penempatan negara tujuan terbuka lebar untuk calon pekerja migran yang telah memiliki dokumen lengkap untuk bekerja ke luar negeri.

Tindak lanjut untuk permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pelindungan adalah sebagai berikut:



- 1) Penjadwalan ulang kegiatan klarifikasi & mediasi, dukungan pendampingan oleh tim Direktorat Layanan Pengaduan dan Mediasi Advokasi Perseorangan maupun Berbadan Hukum pada saat agenda klarifikasi & mediasi, serta Pelimpahan aduan ke KP2MI/BP2MI;
- 2) Penyampaian surat permohonan perkembangan tindak lanjut penanganan aduan Pekerja Migran Indonesia kepada direktorat pengaduan Kementerian P2MI agar dapat dikoordinasikan kepada Perwakilan RI di negara penempatan;
- 3) Pendalaman kesiapan dan ketersediaan bahan pendampingan Laporan Polisi, tim juga telah menyusun daftar informasi dan bukti yang perlu disiapkan serta dibahas sebelum pelaksanaan LP;
- 4) Penyampaian prosedur penerimaan aduan serta aduan yang dinyatakan valid dan dapat ditindaklanjuti, pengecekan data penempatan pada SISKOP2MI, serta pemberian waktu tambahan bagi pengadu untuk melengkapi dokumen aduan;
- 5) Berkoodinasi dengan satker LTSA dan P4MI BP3MI Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kab Kota di Jawa Barat, Polda Jawa Barat & Polres di wilayah Jawa Barat, terkait dugaan penempatan ilegal CPMI;
- 6) Edukasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan, serta pendampingan Laporan Polisi untuk melaporkan calo perorangan yang memproses keberangkatan agar bisa dilakukan pengamanan dokumen perjalanan dan tidak disalahgunakan untuk kembali diproses secara ilegal;
- 7) Berkoordinasi dengan BP3MI titik debarkasi (BP3MI Banten & Bali) / transit (BP3MI Jakarta) untuk dapat memfasilitasi penanganan ketibaan dan pemulangan ke daerah asal, serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan penerimaan keluarga di daerah asalnya;
- 8) Berkolaborasi antara BP3MI Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal fasilitasi penanganan penjemputan dan pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sakit, terkendala, dan meninggal sampai ke daerah asal;
- 9) Penelusuran kepada stakeholder terkait di pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa, bahkan melibatkan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta kantor urusan agama.



LAMPIRAN



TABEL
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	9.275 orang	400 orang	200 orang	600 orang	400 orang	3.000 orang	1.000 orang	5.275 orang	4.800 orang
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%	60%	84%	60%	73%	60%	80%	60%	82%
Meningkatnya Fasilitas Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Fasilitas Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	192 orang	0 orang	0 orang	40 orang	21 orang	40 orang	38 orang	112 orang	93 orang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70	70	78,30	70	78,30	70	78,30	70	78,30
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	60	75	91,5	75	91,5	75	91,5	60	66
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	75	81,86



TABEL
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN REALISASI TRIWULAN

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	9.275 orang	200 orang	400 orang	1.000 orang	4.800 orang	69,00
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60%	84%	73%	80%	82%	80
Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang terfasilitasi Layanan Kepulangan, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi oleh BP3MI	192 orang	0 orang	21 orang	38 orang	93 orang	79,17
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan BP3MI	70	78,30	78,30	78,30	78,30	111,86
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	60	91,5	91,5	91,5	66	110
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75	Baik	Baik	Baik	81,86	109,15